

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini banyak orang mulai gelisah mengenai perilaku kehidupan masyarakat yang miskin karakter positif, baik kalangan elit maupun masyarakat kebanyakan. Para elitnya banyak yang korup, tidak kurang dari 17 gubernur menjadi tersangka korupsi, lebih dari 150 orang bupati dan wali kota, terkena kasus yang sama, yaitu menggelapkan uang negara. Belum lagi mantan menteri, jaksa, hakim, pimpinan BUMN dan bahkan unsur KPK juga, terkena kasus yang sama. Seolah-olah tidak ada yang tersisa, yang mampu mempertahankan kejujuran dan integritasnya yang konsisten. Di dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tauladan, selalu menjaga prinsip-prinsip moral, ternyata juga tidak sepi dari sorotan negatif, terungkapnya ijazah palsu, proses pendidikan yang dijalankan apa adanya, kenaikan jabatan akademik yang tidak semestinya. Itu semua sebagai tanda, bahwa karakter bangsa dianggap mengkhawatirkan. Lebih memperhatikan lagi, dengan maraknya kenakalan remaja, meningkatnya penggunaan narkoba, seks bebas, video porno dan tawuran antar pelajar maupun masyarakat (Suprayogo, 2013:ix).

Fenomena di kalangan orang tua juga tidak kalah mengkhawatirkan, diantaranya terjadi perselingkuhan, beristri simpanan, perzinahan, perjudian, korupsi dan makelar kasus. Belum lagi munculnya kasus-kasus konflik antar elit pemerintahan dan partai politik, saling tidak percaya, menuduh, mencurigai dan

saling memfitnah. Semua itu mengusik banyak pihak, sehingga merasa perlu mencari jalan keluar untuk memperbaiki kondisi karakter bangsa ini. Fenomena yang lain memperlihatkan di hampir semua aspek kehidupan diwarnai dengan relasi yang bersifat transaksional, semua relasi harus ditukar dengan uang, ceramah-ceramah keagamaan tidak dapat berjalan jika tidak tersedia dana untuk membayar oknum penceramah dan biaya menyelenggarakannya. Semua itu mencerminkan betapa semakin sulitnya membangun karakter bangsa ini (Suprayogo, 2013:x-xi).

Karakter merupakan sifat, kejiwaan yang dimiliki seseorang dan muncul dalam bentuk perilaku. Karakter seseorang dengan orang yang lainnya berbeda-beda. Karakter merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. Orang yang perilakunya sesuai dengan norma-norma dipandang berkarakter mulia. Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati dan nilai-nilai lainnya. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya (Gunawan, 2012:3-4). Dari sekian karakter yang ada,

salah satunya adalah kejujuran, kejujuran merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang beradab tidak terkecuali warga negara Indonesia.

Karakter kejujuran atau jujur merupakan sifat terpuji, orang yang jujur adalah mereka yang tidak suka berbohong. Kejujuran dalam bahasa Arab diungkap dengan istilah *shiddiq* dan amanah. *Shiddiq* artinya benar dan amanah artinya dapat dipercaya. Sifat amanah terkandung arti kecerdasan, yaitu kejujuran yang disampaikan secara bertanggung jawab. Kejujuran juga diwariskan oleh genetika orang tua. Setiap orang tua harus menyadari bahwa ketidakjujuran orang tua, terutama ketika anak sedang dalam kandungan, secara psikologis dapat menetes pada anaknya. Karakter kejujuran merupakan bentuk kepribadian yang mengucapkan segala hal tanpa dikurangi dan dilebih-lebihkan atau sesuai kenyataan yang sebenarnya (Salahudin dan Alkrienciehie, 2013:242).

Jujur atau kejujuran merupakan sebuah karakter yang dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Jujur sebagai sebuah nilai merupakan keputusan seseorang untuk mengungkapkan perasaan, kata-kata atau perbuatan mengenai realitas sebenarnya, tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu untuk keuntungan dirinya. Makna jujur lebih jauh dikorelasikan dengan kebaikan atau kemaslahatan. Kemaslahatan memiliki makna kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, tetapi semua orang yang terlibat (Kesuma, dkk, 2012:16).

Kejujuran menjadi tuntutan untuk semua lapisan dan kalangan masyarakat, baik pelajar, penduduk masyarakat, pekerja swasta, aparat pemerintahan dan

kalangan penegak hukum. Kepribadian seseorang yang jujur akan memberikan dampak yang positif, informasi yang tepat, pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan lancar. Aparat pemerintahan yang jujur dapat melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan semua tugas tanpa ada penyimpangan, membuat laporan sesuai dengan kenyataan. Aparat pemerintahan yang jujur akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, mengikis kesenjangan, pengangguran diminimalisir, kesehatan dan pendidikan terjamin, hal tersebut merupakan pemerintahan yang diinginkan seluruh rakyat. Masyarakat yang mempunyai karakter kejujuran akan menciptakan ketenteraman, ikhlas melakukan bergotong royong, saling membantu dan semua pekerjaan yang bersifat kepentingan umum akan berjalan sesuai rencana, tidak ada rasa curiga antar anggota masyarakat. Dengan demikian karakter jujur atau kejujuran akan menguntungkan bagi semua pihak, baik bagi yang melakukan maupun bagi orang lain yang terkena akibatnya.

Akan tetapi, implementasinya karakter kejujuran tidak mudah (Gunawan, 2012:31), banyak terjadi ketidakjujuran di kalangan pelajar. Siswa sekolah dasar mengikuti ujian sekolah berstandar daerah memilih menyontek. Siswa SD tersebut mengaku bahwa sudah memegang kunci jawaban soal ujian Bahasa Indonesia (*Tempo.co*). Selain itu ketidakjujuran banyak terjadi di kalangan masyarakat, mulai dari aparat pemerintahan yang tidak jujur, aparat penegak hukum dan akhirnya berdampak pada masyarakat yang ikut menyimpang dalam karakter kejujuran. Salah satu diantaranya adalah kasus Akil Mochtar, sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, yang merupakan benteng terakhir bagi masyarakat pencari keadilan, menerima suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah pada

Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS) dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar) (Movanita, 2014). Selain itu, dengan skala yang lebih kecil di kalangan aparat pemerintahan juga terjadi ketidakjujuran, diantaranya dilakukan oleh Parjono, Kepala Desa Tangkisan Pos Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, sebagai tersangka korupsi. Parjono tidak jujur karena mengorupsi dana bantuan desa dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak Rp 44,5 juta dari total bantuan Rp 100 juta. Bantuan dana dari Pemprov Jawa Tengah sebesar Rp 100 juta seharusnya digunakan untuk pengembangan desa, namun kenyataannya sebesar Rp 44,5 juta digunakan untuk kepentingan pribadi (*Infokorupsi.com*).

Peristiwa atau kasus Akil Mochtar, Parjono dan siswa SD yang mencontek, merupakan beberapa contoh kasus ketidakjujuran dalam masyarakat dan kehidupan bernegara. Kasus tersebut menjadi pertanda bahwa ketidakjujuran di era sekarang menjadi fenomena dan kejujuran tidak mudah dijalankan secara baik dan konsisten. Kejujuran semakin lama semakin menurun, karena banyak godaannya. Selain itu, masyarakat juga susah untuk berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam penerimaan berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Pemberian bantuan dari pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, namun kenyataannya banyak diantara mereka yang hidupnya sudah berkecukupan menerima bantuan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2008) bahwa bantuan BLT di Kabupaten Kudus, dalam pelaksanaannya dinilai kurang baik, terlihat dengan banyaknya pemotongan dana BLT di tingkat

desa. Pemotongan dana BLT berkisar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 200.000,- . Kriteria miskin dalam penerima BLT tidak diterapkan karena penerimanya berdasarkan pemerataan, guna pemerataan tersebut dilakukan rembug desa dalam menentukan daftar nominasi RTS (Rumah Tangga Sasaran), sehingga masyarakat yang semestinya tidak berhak dan tidak layak mendapatkan BLT malah memperoleh bantuan tersebut. Penelitian Affandi (2013) mengenai pelaksanaan kebijakan program bantuan kesehatan melalui kartu Jamkesmas bagi masyarakat miskin di wilayah Tegalrejo Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri juga ditemukan berbagai persoalan, salah satunya masih banyak data yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, data tidak menyasar dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di lapangan.

Peristiwa di atas merupakan beberapa contoh bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut terjadi karena berkembangnya karakter atau sikap ketidakjujuran dalam masyarakat. Fenomena ketidakjujuran tersebut menimbulkan kesenjangan sekaligus ketidakadilan. Kesenjangan dan ketidakadilan tersebut merupakan realita masyarakat yang menarik untuk diteliti, khususnya kejujuran pada pendistribusian bantuan raskin.

Program raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada menteri dan kepala lembaga pemerintah *non* kementerian tertentu serta gubernur dan bupati atau walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG (Badan Urusan

Logistik) diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah atau beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya (Pedum Raskin, 2014:2).

Idealnya penduduk yang menerima bantuan raskin adalah penduduk yang benar-benar miskin dan harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. Kriteria yang digunakan ada 14 variabel yaitu luas bangunan, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi membeli daging, ayam dan susu dalam seminggu, jumlah stel pakaian baru yang dibeli dalam setahun, akses ke Puskesmas, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga serta kepemilikan beberapa aset (Putri, 2011).

Kriteria di atas seharusnya dipenuhi untuk pendistribusian bantuan raskin, namun kenyatannya pendistribusian bantuan raskin belum tepat sasaran. Banyak penduduk yang memiliki penghasilan yang cukup mendapatkan bantuan raskin. Peristiwa ratusan warga berdesakan dan antri berjam-jam untuk mendapatkan bantuan raskin di balai Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kendal merupakan salah satu kasus bantuan raskin tidak tepat sasaran. Ratusan warga

berdesakan saling berebut masuk ke aula balai desa karena takut tidak kebagian. Diantara mereka yang berebut mengambil jatah bantuan raskin tersebut datang dengan mengendarai motor, (*Berita Kendal.com*) artinya mereka semestinya tidak layak menerima bantuan raskin. Kasus lainnya menimpa nenek Tenri yang tinggal di Desa Liu Tarumpakkae Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Ia hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan, sudah berusia 68 tahun, namun tidak lagi mendapatkan bantuan raskin. Nenek Tenri tinggal seorang diri di sebuah rumah panggung di tengah kebun pisang. Atap rumahnya sudah bocor. Tidak ada penerangan listrik, jika malam tiba hanya mengandalkan pelita. Untuk setiap harinya Ia mendapat bantuan dari tetangganya (Sengkang, 2014). Dua kasus tersebut menggambarkan adanya ketidaksesuaian pada pendistribusian bantuan raskin dan menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan pemerintah mengenai penerima bantuan raskin. Mereka yang semestinya layak menerima tetapi tidak menerima dan sebaliknya, yang berkecukupan malah menerimanya. Namun kasus di atas baru berupa cuplikan berita, belum merupakan hasil penelitian yang komprehensif, karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini secara ilmiah dengan lokasi di Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

Kejujuran pendistribusian bantuan raskin menarik untuk penulis teliti karena relevan dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), mengingat penulis merupakan calon guru PPKn. Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Daryono dkk, 2011:1).

PPKn merupakan wadah dalam membentuk karakter bangsa termasuk karakter kejujuran.

Selain itu penelitian mengenai karakter kejujuran juga terkait dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Relevansi tersebut dapat dilihat dari visi, misi maupun tujuannya. Visi program Studi PPKn FKIP UMS yaitu menjadi pusat pengembangan pendidikan dan pembelajaran bidang PPKn serta Ketatanegaraan untuk membentuk bangsa yang berkarakter kuat dan memiliki kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat madani. Visi tersebut selanjutnya dirumuskan dalam misi Program Studi PPKn FKIP UMS diantaranya adalah memajukan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter kuat sehingga mampu memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan menuju masyarakat madani (Buku Panduan FKIP, 2013:138). Karakter kejujuran yang penulis teliti merupakan bagian penting dari pengembangan dan pembinaan karakter dalam visi dan misi dimaksud.

Selanjutnya, visi dan misi di atas dirumuskan dalam tujuan Program Studi PPKn FKIP UMS diantaranya menghasilkan guru berkarakter kuat dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional (Buku panduan FKIP, 2013:138). Sesuai tujuan tersebut pembelajaran PPKn merupakan pembelajaran yang penting dalam membentuk karakter yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga menghasilkan generasi bangsa yang berkarakter, terlebih karakter kejujuran. Karakter kejujuran merupakan karakter yang mulia sehingga dapat

menguntungkan kepada dirinya maupun kepada pihak lain. Selain itu karakter kejujuran merupakan pondasi untuk membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang baik, bangsa yang terhindar dari korupsi, kolusi dan lain sebagainya.

Program Studi PPKn FKIP UMS pada dasarnya bertujuan untuk membentuk moral bangsa sehingga memiliki karakter yang kuat. Kedudukan peneliti adalah sebagai mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UMS sehingga peneliti memiliki kewajiban berpartisipasi untuk membentuk karakter bangsa yang kuat sebagaimana tertuang pada visi, misi dan tujuan program studi PPKn FKIP UMS. Fokus penelitian ini adalah mengenai karakter khususnya karakter kejujuran atau jujur, sehingga relevan dengan kedudukan peneliti sebagai mahasiswa program Studi PPKn FKIP UMS.

Paparan di atas mendorong penulis untuk mengadakan penelitian terhadap pendistribusian bantuan raskin. Oleh karena itu, dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian tentang “Karakter Kejujuran pada Pendistribusian Bantuan Raskin di Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2014”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil pendistribusian bantuan raskin di Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati?
2. Bagaimanakah karakter kejujuran pada pendistribusian bantuan raskin di Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati?

3. Bagaimanakah kendala pelaksanaan karakter kejujuran pada pendistribusian bantuan raskin di Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati?
4. Bagaimanakah solusi dari kendala pelaksanaan karakter kejujuran pada pendistribusian bantuan raskin di Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan profil pendistribusian bantuan raskin di Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
2. Untuk mendeskripsikan karakter kejujuran pada pendistribusian bantuan raskin di Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
3. Untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan karakter kejujuran pada pendistribusian bantuan raskin di Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
4. Untuk mendeskripsikan solusi dari kendala pelaksanaan karakter kejujuran pada pendistribusian bantuan raskin di Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai karakter kejujuran pada pendistribusian bantuan raskin.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk kegiatan penelitian berikut yang sejenis.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Pemerintah.
 - 1) Sebagai evaluasi dalam memberikan bantuan raskin, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.
 - 2) Agar lebih selektif dalam menentukan penduduk yang berhak mendapatkan bantuan raskin.
 - 3) Melaksanakan kebijakan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang dijadikan dasar penerima bantuan raskin.
- b. Masyarakat.
 - 1) Mengawasi program pemerintah, agar sesuai dengan ketentuan sehingga tepat sasaran.
 - 2) Menyatakan yang sebenarnya bahwa Pendistribusian tidak terkategori ke dalam penerima bantuan raskin.
 - 3) Tidak memanipulasikan keadaan untuk kepentingan dirinya maupun orang lain.

E. Daftar Istilah

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, peneliti perlu mencantumkan daftar istilah dari skripsi ini. Adapun daftar istilah skripsi ini sebagaimana uraian berikut.

1. *Karakter*, adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak, budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain (Hidayatullah, 2010:16). Selain itu, karakter dirumuskan pula sebagai sesuatu yang sangat penting dan vital bagi tercapainya tujuan hidup, adanya karakter maka akan mendorong pilihan untuk menentukan yang terbaik dalam hidup (Samani dan Hariyanto, 2011:22). Karakter disebut juga sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak (Kemendiknas dikutip dalam Nashir, 2013:10). Jadi karakter merupakan kualitas yang dimiliki seseorang yang dapat berupa moral, kekuatan, akhlak, budi pekerti yang akan mendorong pilihan untuk menentukan yang terbaik dalam hidup yang membedakan dengan individu lain.
2. *Kejujuran*, dinyatakan sebagai sebuah nilai yang positif, karena perilaku ini menguntungkan baik bagi yang melakukannya maupun bagi orang lain yang terkena akibatnya. Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkata, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain (Gunawan, 2012:31-

33). Jujur disebut juga sebagai perilaku yang ditandai dengan menyatakan apa adanya, melakukan sesuatu karena kebenaran (kemasalahatan), tidak bohong, dan menyatakan sesuatu sesuai dengan hatinya (Kesuma dkk, 2011:17). Selain itu, Jujur sekaligus merupakan perilaku yang ditandai dengan menyatakan apa adanya, konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan, berani karena benar, dapat dipercaya dan tidak curang (Samani dan Hariyanto, 2011:51). Jadi kejujuran merupakan sebuah perilaku yang positif yang ditandai dengan tidak berbohong, menyatakan apa adanya dan dapat menguntungkan kepada dirinya maupun kepada pihak lain.

3. *Masyarakat*, adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014:885). Selain itu, masyarakat merupakan sistem adaptif, karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan untuk dapat bertahan dan harus memenuhi kebutuhan agar dapat hidup terus (Soekanto, 2007:23). Masyarakat merupakan kumpulan orang yang di dalamnya hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama dan mereka menciptakan nilai, norma, serta kebudayaan bagi kehidupan mereka (Setiadi, dkk, 2008:82-83). Jadi masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama untuk memenuhi berbagai kepentingan agar dapat hidup terus.
4. *Penerima*, merupakan orang yang menerima (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014:1451). Disebut pula yaitu seluruh pemasukan yang diterima dari kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang tanpa dikurangi

dengan total biaya produksi yang dikeluarkan (Rikar, 2011). Jadi penerima adalah orang yang menerima.

5. *Bantuan Beras Miskin (raskin)*, merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan raskin, 2014). Raskin merupakan program yang diinstruksikan dari pemerintah kepada lembaga yang dibawahnya diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah (Pedum Raskin, 2014:2). Disebut pula sebagai program untuk rumah tangga miskin yang tujuannya adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras (Musawa, 2009). Jadi bantuan raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah.